



PUTUSAN
Nomor 288/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Lantai 18-19, Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2434/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktur Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TAMBANG DAMAI, beralamat di Jalan Alaydrus, Nomor 82, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta, yang diwakili oleh Insinyur Hiu Kirtiadi, jabatan Wakil Direktur Utama PT Tambang Damai;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.109367.16/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288/B/PK/Pjk/2019



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding:

No.	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	0,00	86.163.561.135,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	18.228.824.563,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nyadipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	104.392.385.698,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	104.392.385.698,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	104.392.385.698,00	104.392.385.698,00
	d. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar		
	a. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	0,00	1.822.882.456,00
	b. Dikurangi :		
	b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00	8.234.210.121,00
	b.2. Lain-Lain	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	8.234.210.121,00
3	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00	8.234.210.121,00
4	Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	0,00	(6.411.327.665,00)
5	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0,00	0,00
6	Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	0,00	(6.411.327.665,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.109367.16/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00256/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00008/507/14/029/15 tanggal 6 Juli 2015, atas nama PT Tambang Damai, NPWP 01.614.652.4-029.000, Jenis Usaha Pertambangan Batu Bara Generasi III, beralamat di Jalan Alaydrus, Nomor 82, Petojo Utara, Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
--------	-------------



a. Penyerahan PPN atas ekspor	86.163.561.135,00
b. Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri	18.228.824.563,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	104.392.385.698,00
	1.822.882.456,00
c. PPN Yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
	6.847.913.170,00
d. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.234.210.121,00
e. Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	(6.411.327.665,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.109367.16/2014/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.109367.16/2014/-PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, karena Putusan



Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00256/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00008/507/14/029/15 tanggal 6 Juli 2015, atas nama PT Tambang Damai, NPWP 01.614.652.4-029.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00256/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 4 Oktober 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00008/507/14/029/15 tanggal 6 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.614.652.4-029.000, sehingga pajak yang lebih dibayar



menjadi Rp6.411.327.665,00, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan untuk Masa Pajak Juni 2014 sebesar Rp8.234.210.121,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa transaksi yang berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III yang telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena Batubara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, *disliming*, konsentrasi dan penyaringan bahan galian merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga proses penyerahan terutang PPN yang dapat dilakukan melalui mekanisme pengkreditan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (8) serta Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288/B/PK/Pjk/2019



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.411.327.665,00, dengan perincian sebagai berikut:

a. Penyerahan PPN atas ekspor	Rp	86.163.561.135,00
b. Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri	Rp	18.228.824.563,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	104.392.385.698,00
	Rp	1.822.882.456,00
c. PPN Yang harus dipungut/dibayar sendiri		0,00
		6.847.913.170,00
d. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	8.234.210.121,00
e. Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	(6.411.327.665,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288/B/PK/Pjk/2019



H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288/B/PK/Pjk/2019